

Kamis, 16 Juni 2022

--Bupati Menulis--



Oleh: Suprawoto
(Bupati Magetan)

Menyejahterakan dengan Kebijakan

SAAT ini pemerintah sedang getol mengampanyekan optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sebenarnya, bukan sekali ini saja pemerintah mengampanyekan penggunaan produk dalam negeri. Setiap rezim yang berkuasa selalu sadar pentingnya penggunaan produk lokal. Itu dapat dirunut di setiap era kekuasaan negeri ini.

Jelang peringatan 20 tahun kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menyinggung konsep berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) untuk kali pertama. Dalam pidato berjudul *Tahun Vivere Pericoloso!*, Bung Karno memformulasikan konsep Trisakti. Yaitu, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi bangsa.

Konsep berdikari diperjelas pada 17 Agustus 1965. Bung Karno menekankan bahwa Indonesia bisa mandiri dan tidak bergantung bangsa lain. Baik dalam kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Berdikari bukan anti-asing. Namun, ketika bekerja sama dengan asing, Indonesia harus pada posisi yang sejajar. Tidak menjadi subordinasi.

Sayangnya, Bung Karno turun sebelum gagasannya berjalan. Di era Orde Baru, Presiden Suharto justru mengundang modal asing secara deras guna memperbaiki ekonomi yang terpuruk. Saking derasnya modal asing yang masuk waktu itu, peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) pun pecah. Salah satu yang disinggung mahasiswa adalah modal asing.

Kesadaran dalam mengutamakan produk dalam negeri muncul 20 tahun kemudian. Bahkan, pemerintah sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan IV (1983-1988).

Untuk mengampanyekan cinta produk dalam negeri, sampai ada lagu *Aku Cinta Buatan Indonesia* yang dinyanyikan grup musik legendaris Bimbo. Lagu ini diputar berulang-ulang di RRI dan TVRI pada 1980-an. *Reff* lagu itu sederhana, namun menacap dalam benak orang-orang yang hidup di era 1980-an, "*aku cinta, Anda cinta, semua cinta, buatan Indonesia...*" ■ ▶ Baca *Menyejahterakan...* Hal.19

Sambungan dari Hal.16

Di era reformasi, khususnya era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ajakan cinta produk dalam negeri kembali mengemuka. Kali ini melalui slogan "100% Cinta Indonesia" yang diprakarsai Kemendag dan Kemenkominfo. Saya ingat, karena serbuan *handphone* begitu masif, Menkominfo mengeluarkan kebijakan TKDN 40 persen bagi perangkat telekomunikasi impor.

Sayang seribu sayang, kebijakan pemerintah tidak konsisten. Pada forum pertemuan di Bali, 25 Maret 2022, Presiden Jokowi sampai mengungkapkan kegeramannya. Di hadapan para menteri, kepala lembaga, BUMN, gubernur, serta bupati dan wali kota se-Indonesia yang hadir, presiden mengingatkan pentingnya penggunaan produk lokal. Di rapat kerja dengan tema *Aksi Afirmasi Bangsa Buatan Indonesia* itu, presiden berkali-kali mengingatkan dengan nada keras.

Seperti yang pernah saya tulis pada kolom ini, semua negara sedang dalam kesulitan. "*Jalan keluarnya beli buatan dalam negeri,*" begitu bunyi arahan

presiden. Belanja pemerintah menjadi *trigger* (pemicu) pertumbuhan ekonomi. Belanja modal pusat mencapai 526,8 triliun dan daerah Rp 535 triliun. Belanja modal BUMN Rp 420 triliun. Kalau 40 persen saja dibelanjakan untuk produk dalam negeri, akan memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7 persen.

"*Bodoh sekali kalau tidak kita lakukan.*" Presiden kelihatan sangat kesal dan marah melihat kenyataan ini. Kalau kita impor, justru akan memberi lapangan pekerjaan bagi negara lain. Presiden pun konsisten mendorong pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri. Bahkan, di daerah, UMKM diharapkan ikut berpartisipasi lewat e-katalog lokal.

Kebetulan saya pernah belajar reformasi birokrasi di Korsel. Juga tiga kali mengunjungi negara tersebut. Ada sebuah cerita mengenai pekerjaan loka bangsa Korsel terhadap Jepang yang pernah menjajah dan memperlakukan bangsa Korsel sebagai budak. Bahkan sebagai budak seks.

Suatu ketika ada rombongan misi dari Korsel ke Jepang. Pu-

langnya membawa barang elektronik buatan Jepang yang saat itu belum ada di Korsel. Waktu pemeriksaan di bandara langsung diminta untuk dibakar. Karena bagaimanapun, di dada petugas, aparat, dan warganya tertanam rasa bangga memakai buatan bangsa sendiri. Dan, buatan Korsel adalah yang terbaik.

Ini dapat dijadikan tolok ukur. Kalau kita ke Korsel, jangan heran dengan mobil yang lalu-lalang di jalan. Semua buatan Korsel. Sedikit yang buatan Eropa. Bahkan, saya sama sekali tak melihat mobil buatan Jepang. Bisa jadi yang memakai mobil buatan Jepang di Korsel hanya kedutaan Jepang.

Penduduk Korsel sekitar 51 juta jiwa. Itu pasar potensial untuk produk dalam negerinya. Konsistensi pemerintah dan rakyatnya dalam mencintai produk dalam negeri membentuk kemandirian bangsa. Bandingkan dengan Indonesia yang saat ini penduduknya sekitar 273 juta jiwa. Tentu pasar yang sangat besar untuk produk dalam negeri.

Sebagai bupati, mulai dua tahun lalu saya mengeluarkan kebijakan kepada semua karyawan Pemkab Magetan untuk memakai batik khas Magetan.

Dulu hanya ada tujuh perajin batik, itu pun kembang Kempis. Sekarang sudah 47 perajin. Kemudian saya perluas, guru pada hari Selasa sampai Jumat boleh tidak berseragam, namun memakai batik khas Magetan. Demikian juga nakes, tidak perlu berseragam tapi memakai batik khas Magetan.

Tak ketinggalan sektor perbankan. Terasa aneh, bank memberi pinjaman lunak dan semacamnya untuk warga Magetan, namun seragam batik yang dipakai bukan produk lokal. Oleh sebab itu, kami mengimbau karyawan bank memakai batik khas Magetan. Dengan kebijakan yang memihak masyarakat, inisiatif tumbuh dengan sendirinya. Buktinya, jumlah perajin batik di Magetan terus meningkat.

Menyejahterakan masyarakat, menurut saya, tidak semata-mata harus dengan memberi uang. Justru lebih penting adalah kebijakan yang memihak masyarakat. Seperti yang terjadi di Korsel. Kebijakan yang saat ini sedang getol digaungkan pemerintah harus konsisten dijalankan oleh semua. Juga harus menjadi komitmen kita bersama. (* / naz / c1)